

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

Ni Putu Eka Widyastuti¹

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

e-mail: ekawidyastuti027@gmail.com

ABSTRACT

The quality of financial reports can be said to be good, if they provide financial statement information that is easy to understand, and can meet the needs required by the user in making a decision, free from misleading meanings, errors in material and can be relied on. The purpose of this study was to determine the effect of the application of government accounting standards (SAP) and financial supervision on the quality of the regional government financial reports of Denpasar city. The data used in this study are primary data using a questionnaire as a method of collecting data obtained from respondents. The population in this study were all employees in OPD in Denpasar City. The method of determining the sample in this study used a purposive sampling method, with the criteria for the sample who held positions as Head of the Finance Subdivision, Expenditure Treasurer and employees who directly carry out accounting functions in OPDs throughout Denpasar City. The sample used in this study were 43 OPDs in Denpasar with 129 respondents. The analysis technique used in this research is Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study indicate that the effect of government accounting standards (SAP) and financial supervision has a positive and significant effect on the quality of financial reports for the local government of Denpasar city.

Keywords: *Government Accounting Standards, Financial Control, Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat dalam bentuk penyampaian pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan selama satu periode harus disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa

depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud menurut Omasrianto dan Hasbudin, dkk (2017).

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Kualitas laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, serta bisa memenuhi kebutuhan yang di perlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka dari itu laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode sebelumnya menurut Ikyarti dan Aprilia (2019). Pemahaman akuntansi merupakan hal terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh para karyawan terutama di bagian keuangan, maka laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan dan para pegawai bagian keuangan akan memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan itu dilakukan sampai menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas menurut Ari Setia (2019).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, agar pengguna dapat memahami laporan keuangan yang telah disajikan. Menurut PP No 71 Tahun 2010, terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam melakukan dan membuat penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat dalam bentuk penyampaian pelaporan keuangan.

Pengawasan adalah suatu cara yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, dan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi atau pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan menurut Yosa (2010).

Fenomena yang terjadi di beberapa OPD Kota Denpasar yaitu Pemerintah Kota Denpasar merupakan instansi pemerintah dengan menyandang banyak prestasi, diantaranya: kota peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Sagung & Wayan, 2016). Namun, beberapa temuan hadir, seperti dari hasil pemeriksaan Inspektorat ditemukan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian kepala OPD, diantaranya perjalanan dinas double pembayaran (dibayar panitia dan APBD), kesalahan kode rekening anggaran, kekurangan volume pekerjaan/kelebihan pembayaran serta pendistribusian BBM yang belum optimal dan mengacu pada aturan yang telah ada (www.nusabali.com, 2017). Kerugian atas kasus ini mengindikasikan bahwa masih kurang efektifnya standar akuntansi pemerintah, peran audit internal dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Daerah Kota Denpasar sehingga masih ada celah penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, sangat penting untuk diteliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar yang sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah dan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga diperlukan pembenahan terhadap pengawasan keuangan agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar”**.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar?

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui mengenai Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Manfaat penelitian ini untuk pihak praktisi adalah diharapkan sebagai bahan masukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Manfaat penelitian untuk teoritis adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis dan menjadi bahan referensi yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori dasar merupakan landasan teori yang merupakan panduan bagi peneliti guna mendapatkan arah yang tepat dalam melakukan suatu penelitian, karena sangat penting bagi peneliti untuk menggambarkan dari sudut mana suatu masalah yang akan disoroti. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan dasar teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori, dan teori organisasi. Prinsip utama pada teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan didaerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat dalam bentuk penyampaian pelaporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ikyarti dan Aprilia (2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, menarik kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian Yanti dan Made, dkk (2020) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Malang menarik kesimpulan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Malang.

Berdasarkan pokok permasalahan dan landasan teori adapun rumusan hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka akan bisa mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan keinginan principal. Hasil penelitian yang mendukung pengaruh SAP terhadap laporan keuangan pemerintah yang berkualitas daerah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Ikyarti dan Aprilia (2019) serta Muchlis dan Sutrisna, dkk (2016). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

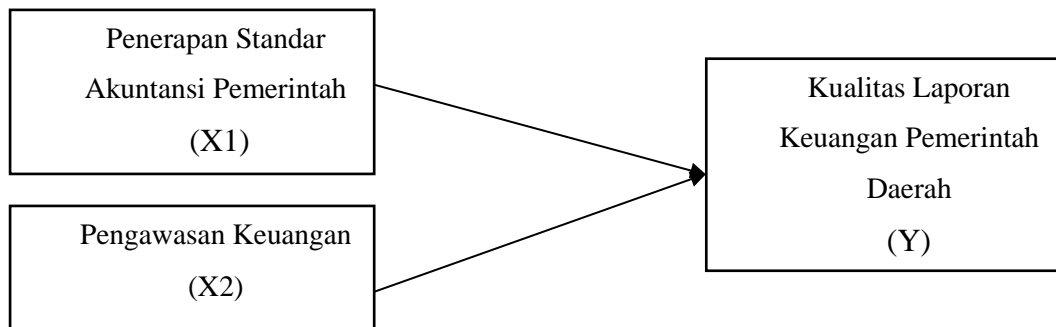
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan yang perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Hasil penelitian yang mendukung pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah yang berkualitas daerah yang mempengaruhi kualitas laporan Keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Kuasa dan Abdullah (2016) serta Yanti dan Made (2020). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Penerapan Pengawasan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang cocok digunakan untuk mendapatkan jawaban masalah serta tujuan penelitian. Pada penelitian ini pendekatan yang cocok digunakan adalah pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Menurut Sugiyono (2013:55), penelitian asosiatif memiliki sifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini variabel yang di uji yaitu pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka berpikir pada penelitian ini yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar, seperti gambar berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*variable dependent*) dan variabel bebas (*variable independent*). Penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Pengawasan Keuangan (X_2) dan variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Adapun definisi operasional variable dalam penelitian ini yaitu : Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan dapat diukur dengan indikator oleh Sudiarianti, dkk (2015) sebagai berikut: 1) Penyajian Laporan Keuangan, 2) Laporan Realisasi Anggaran, 3) Laporan Arus Kas, 4) Catatan atas Laporan Keuangan, 5) Akuntansi Persediaan, 6) Akuntansi Investasi, 7) Akuntansi Aset, 8) Akuntansi Kewajiban, 9) Koreksi Kesalahan, 10) Laporan Keuangan Konsolidasi, 11) Laporan Operasional

Pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Indikator untuk mengukur pengawasan keuangan oleh Yosa (2010) sebagai berikut: 1) mengevaluasi prestasi kerja, 2) menghindari kemungkinan adanya penyelewengan, 3) memberikan bimbingan dan mengarahkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, 4) menjamin bahwa setiap kegiatan yang sudah dilakukan sesuai rencana dan aturan yang berlaku.

Menurut Syafri (2013:146) Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Indikator untuk mengukur kualitas laporan keuangan oleh Widiantariati (2019) sebagai berikut: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, 4) dapat dipahami.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:90). Populasi dalam penelitian ini adalah 43 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kota Denpasar.

Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013:91). Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2013:96). Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu:

1. Pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau yang langsung terlibat dalam menyusun laporan keuangan di masing-masing OPD.
2. Pengalaman kerja dalam pengelolaan keuangan minimal satu tahun.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Uji Instrumen

Uji validitas dapat dilakukan dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pada pertanyaan dengan jumlah skor sehingga akan diperoleh nilai *person correlation*. Instrumen dikatakan valid apabila nilai *person correlation* lebih besar dari 0,3 (Sugiyono, 2013:177).

Uji Reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur konsistensi serta stabilitas dari kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban yang diberikan oleh responden konsisten dari waktu ke waktu. Variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* lebih besar 0,6 (Ghozali & Imam, 2011:48).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik, untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan, yang terdiri dari :

Uji Normalitas dilakukan dengan membandingkan distribusi kumulatif hasil observasi dengan distribusi kumulatif relative teoritisnya. Data populasi dapat dikatakan berdistribusi normal dengan melihat nilai *asympt. Sig (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Ghozali & Imam, 2011: 160).

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika $VIF > 10$ dan *nilai tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali & Imam, 2011: 105).

Uji Heteroskedastisitas, apabila nilai signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat dikatakan model regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak mengandung heteroskedastisitas, dengan kata lain model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali & Imam, 2011 : 139).

3. Uji Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Teknik tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu antara Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Audit Internal, Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Mencari persamaan garis regresi dengan menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2 = Pengawasan Keuangan

e = Variabel pengganggu

4. Uji Kelayakan Model

Koefisien determinasi (R^2) dapat mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam

menjelaskan variasi dari variabel terikat sangat terbatas dan sebaliknya. Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari nilai *adjusted R²*, karena nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel ditambahkan ke dalam model (Ghozali & Imam, 2011: 97).

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi secara serempak seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Anno dengan menggunakan program SPSS. Hasil uji F yang signifikansi apabila nilai $F_{sig} < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat (Ghozali & Imam, 2011: 98).

Uji statistik (uji t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui hasil uji t ini dengan melihat hasil regresi dari proses program SPSS yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha=0,05$. Apabila tingkat signifikansi $t < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan sebaliknya jika tingkat signifikan $t > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima (Ghozali & Imam, 2011: 98).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan informasi mengenai deskripsi variabel penelitian khususnya mengenai pengukuran rata-rata (mean), dan deviasi standar.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	129	84.00	138.00	110.2326	11.42401
X2	129	11.00	21.00	16.1163	3.22497
Y	129	30.00	51.00	40.0698	5.29620
Valid N (listwise)	129				

Sumber : Lampiran 5, 2021

Pada tabel 4.1 bahwa N atau jumlah data menunjukkan pada setiap variabel yang valid adalah 129. Data Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki nilai minimum 84.00, nilai maksimum 138.00, nilai rata-rata 110.2326 dan standar deviasi 11.42401. Data Pengawasan Keuangan (X2) memiliki nilai minimum 11.00, nilai maksimum 21.00, nilai rata-rata 16.1163 dan standar deviasi 3.22497. Data Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai minimum 30.00, nilai maksimum 51.00, nilai rata-rata 40.0698 dan standar deviasi 5.29620.

Pengujian instrument penelitian yang baik harus memenuhi validitas dan reabilitas.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel

No	Variabel	Item Pertanyaan	Koefesien Korelasi	Keterangan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	X1.1-X1.28	0.321-0.777	Valid
2	Pengawasan Keuangan	X3.1-X3.5	0.540-0.896	Valid
3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y.1-Y.11	0.448-0.850	Valid

Sumber : Lampiran 4, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dan dapat dipakai untuk menguji hipotesis penelitian, karena nilai pada setiap instrumen memiliki nilai korelasi di atas 0,3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.914	Reliabel
2	Pengawasan Keuangan	0.819	Reliabel
3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.912	Reliabel

Sumber : Lampiran 4, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui untuk seluruh instrumen tersebut di atas adalah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dipakai untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

Uji asumsi klasik, untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		129
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	4.93711961
	Most Extreme Absolute Differences	0.078
	Positive	0.078
	Negative	-0.040
Test Statistic		0.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.054 ^{c,d}

Sumber : Lampiran 7, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 yaitu pada tabel diatas nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,054 maka dari itu model regresi variabel independen dan variabel dependen dinyatakan memiliki distribusi normal.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoleniaritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	21.623	4.901		4.412	0.000		
	X1	0.092	0.039	0.191	2.396	0.018	0.998	1.002
	X2	0.513	.0137	0.312	3.755	0.000	0.998	1.002

Sumber : Lampiran 7, 2021

Dari Tabel 4.5 di atas dapat di jelaskan bahwa besarnya nilai VIF < 10 dan nilai tolerance >0,1 jadi tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.284	2.762		1.914	0.058
	X1	-0.011	0.022	-0.046	-0.521	0.603
	X2	0.002	0.077	0.002	0.020	0.984

Sumber : Lampiran 7, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, nilai sig dari regresi absolut residual > 0.05 maka dari itu model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.623	4.901		4.412	0.000		
X1	0.092	0.039	0.191	2.396	0.018	0.998	1.002
X2	0.513	0.137	0.312	3.755	0.000	0.998	1.002

Sumber: Lampiran 8, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat diketahui persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 21.623 + 0.092X_1 + 0.513X_2$$

$\alpha = 21.623$ memiliki arti bahwa apabila tidak ada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 21.623. Dalam arti kata Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 21.623 sebelum atau tanpa adanya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan (X_1 dan $X_2 = 0$).

$\beta_1 = 0.092$ memiliki arti bahwa setiap peningkatan 1 persen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.092 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

$\beta_2 = 0.513$ memiliki arti bahwa setiap peningkatan 1 persen Pengawasan Keuangan, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.513 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel 4.7 diperoleh hasil uji t yaitu untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) diperoleh p-value yaitu $0.018 < 0.05$ ini berarti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan kata lain dalam penelitian ini membuktikan uji hipotesis pertama bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk variabel Pengawasan Keuangan (X_2) diperoleh p-value yaitu $0.000 < 0.05$ ini berarti Pengawasan Keuangan (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan kata lain dalam penelitian ini membuktikan uji hipotesis ketiga bahwa Pengawasan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil pengujian uji F pada lampiran 7 dapat dilihat bahwa, nilai p-value dari F yaitu $0.000 < 0.05$ maka dari itu model penelitian layak untuk digunakan.

Koefisien Determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model menerangkan variasi dalam variabel dependen. Berdasarkan perhitungan hasil yang dapat dilihat pada lampiran 7, dapat diperoleh nilai koefisien determinasi (D) *Adjusted R Square* adalah $0.117 \times 100\% = 11\%$. Dengan demikian sebanyak 11% variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mampu dijelaskan oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan. Sedangkan 89% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model tersebut. Variabel lain tersebut seperti variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan variabel Perangkat Pendukung.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Semakin tinggi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka dapat juga meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintahan daerah kota Denpasar yang berarti mampu memberikan informasi keuangan yang relevan dan reliabel.

Variabel Pengawasan Keuangan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Dengan adanya pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran, pendapatan daerah dapat diperuntukan untuk kepentingan publik. Perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semua proses berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut andal.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu : Bagi pemerintah, Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD di Kota Denpasar akan semakin baik bila diperkuat dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peran Audit Internal yang sistematis dan objektif serta Pengawasan Keuangan yang berkesinambungan. Bagi peneliti berikutnya diharapkan agar menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

Daftar Pustaka

- A.A Sagung, A, N, A., & I Wayan, S., (2016). Pemahaman Atas SAP Sebagai Pemoderasi Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Kinerja Anggaran SKPD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Vol.17.2. Universitas Udayana.*
- Ari Setia, D. N. K, (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Peran Internal Audit, Efektifitas Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Studi pada SKPD Kabupaten Tabanan).
- Gozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPS. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi ISSN, 9(2)*, 2019.
- Kuasa, N., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 5(2)*.
- Muchlis, S., Sutrisna, A., & Gumilar, R. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Makassar. *Jurnal Informasi Akuntansi dan Keuangan (INFAK), 3(1)*, 1-8.
- Nusa Bali, (2017). Pastika Warning Pimpinan SKPD, Pertahankan Opini WTP, Optimalkan Pengawasan. <https://www.nusabali.com/berita/9978/pastika-warning-pimpinan-skpd/halaman/1>
- Omasrianto, O., Hasbudin, H., & Mas'ud, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan, Audit Internal dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Universitas Halu Oleo. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan), 2(1)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Online), (<https://m.hukumonline.com>)
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII.*
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, H. S. (2013). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. *Rajawali. Jakarta.*

Utama, I. K. I. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Denpasar.

Widiantariati, I. G. A, (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrua, Kualitas Aparatur Daerah, Pengawasan, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Gianyar.

Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).

Yosa. (2010). Pengertian Pengawasan. Sumber: [www. itjenkemdagri.go.id](http://www.itjenkemdagri.go.id).